

ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Riko Tumbelaka¹, George M.V. Kawung², Richard L. Tumilaar³

¹²³Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: Rikotumbelaka25@gmail.com

ABSTRAK

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, dimana pengeluaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Sampel penelitian ini adalah *Time Series* yaitu 15 tahun. Hasil pengujian Parsial atau Uji-t Statistik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum & Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Daerah, Sedangkan Dan Dana Bagi Hasil Positif tapi tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah, dan pada pengujian Simultan atau secara bersama-sama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah

ABSTRACT

Regional spending becomes period government places. Shopping from anywhere, where it's not direct. This study aims to prove that the Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Funds for Results in the Minahasa District Government. Data analysis and hypothesis testing were performed using classical regression test and multiple linear regression. The sample of this study is a Time Series of 15 years. Partial test results or t-Test Statistics show that Regional Original Revenue and General Allocation Funds Affect Regional Expenditures, While Special Allocation Funds and Positive Profit Sharing Funds but Profitable Shopping Expenditures, and at the end of Simultaneous or equivalent shows Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Funds for Regional Expenditures.

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing, Regional Expenditures*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah pelimpahan wewenang di bidang penerimaan` anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah secara efektif dan efisien untuk membiayai pos belanjanya yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut (Setiawan, 2010:16). Sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah karena salah satu indikator kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD dapat menunjukkan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam membiayai berbagai macam kegiatan operasionalnya, hal tersebut yang menimbulkan terjadinya ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maupun antar Pemerintah Daerah. Dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari dana APBN.

APBD begitu penting karena berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi ,pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mengelola keuangan daerahnya secara efisien, efektif dan sebaik mungkin agar dapat mencapai tujuan daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang semakin maju. Tiga komponen APBD yaitu belanja daerah, pendapatan daerah pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu daerah, jika ketiganya diolah dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik bagi pula bagi perekonomian daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

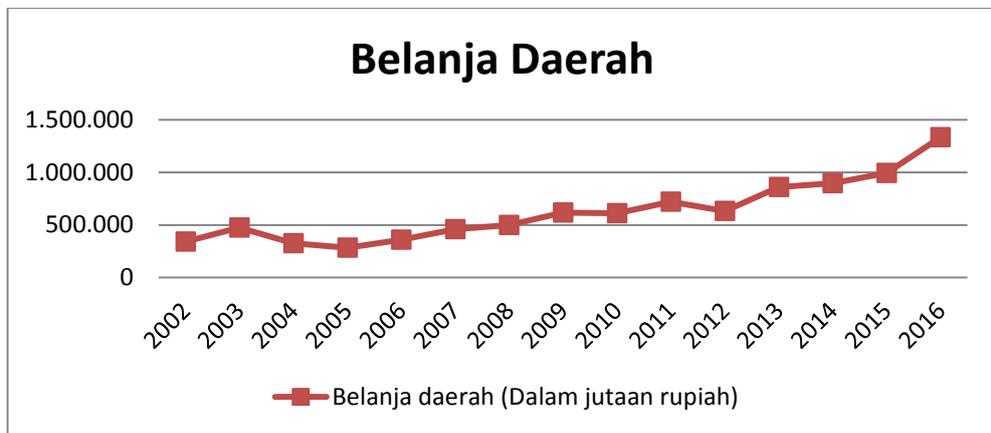
Belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran, dimana pengeluaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja daerah biasanya direalisasikan digunakan untuk belanjapegawai, barang dan jasa, dan untuk belanja modal. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

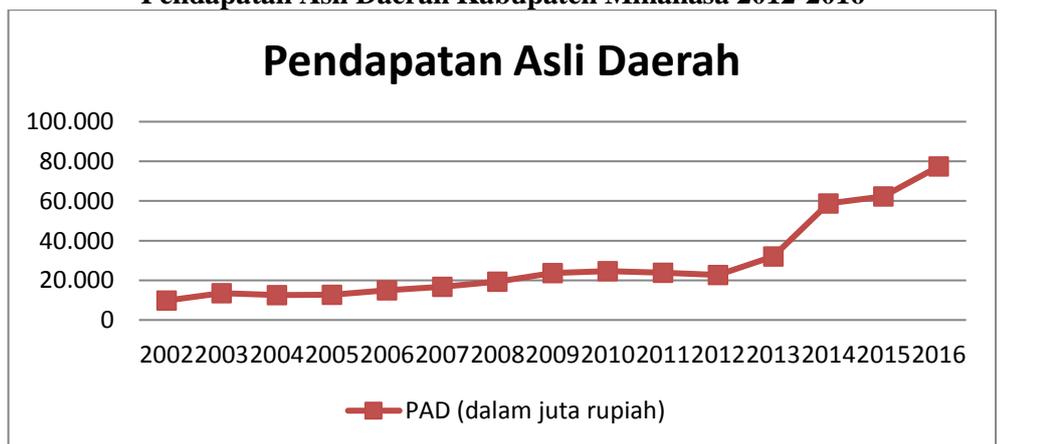
Berikut ini akan disajikan jumlah belanja daerah kabupaten minahasa tahun 2012-2016.

Grafik 1.1
Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2012-2016



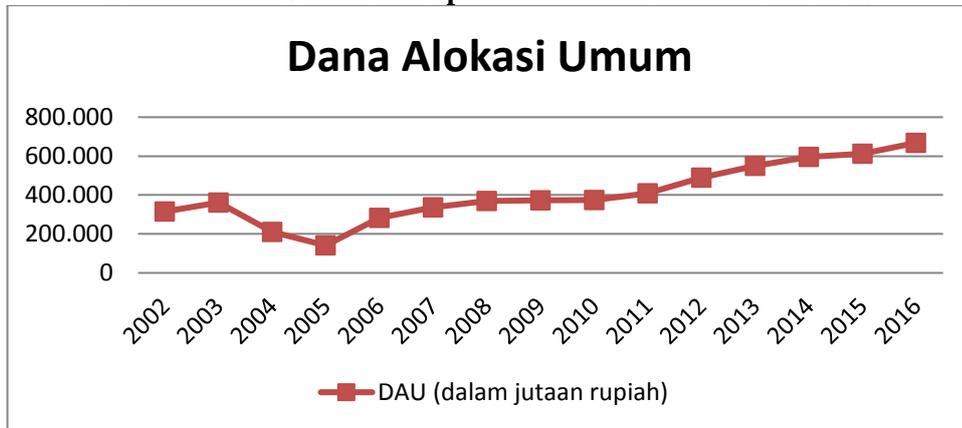
Dari Grafik 1.1 Dapat dilihat bahwa Belanja Daerah Kabupaten Minahasa menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan dari tahun ketahun. Peningkatan yang menonjol terdapat pada tahun 2002 ke 2003 yaitu sebesar 38.2%, dan penurunan yang menonjol terdapat pada tahun 2003 ke 2004 yaitu sebesar 31%.dan pada tahun 2004-2009 terjadi peningkatan yang stabil dan pada tahun 2010 ke 2011 terjadi peningkatan sebesar 18.7% dan turun sebesar 12% pada tahun 2012. Namun dari tahun 2012-2016 terjadi peningkatan yang signifikan. Berdasarkan uraian di Atas .

Grafik 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa 2012-2016



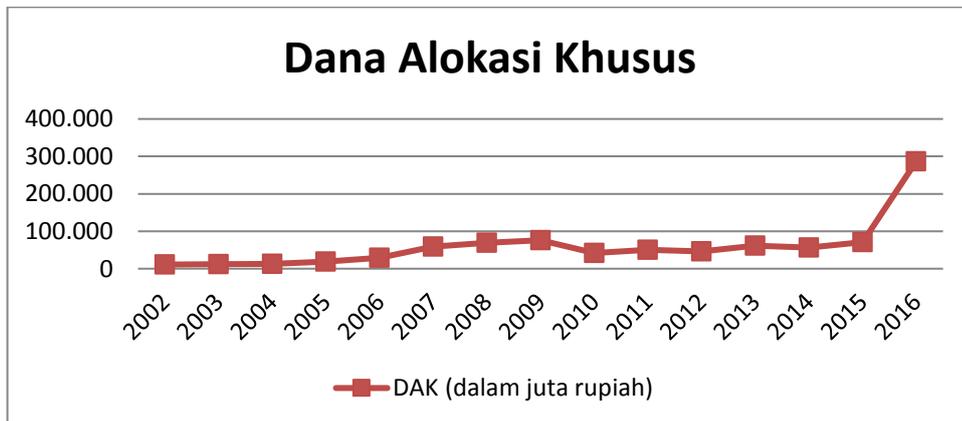
Dari Grafik 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2002-2011 terjadi fluktuasi dan pada tahun 2012-2016 terjadinya peningkatan yang signifikan pada tingkat PAD . Hal ini berarti pemerintah kabupaten minahasa mampu mengelolah dan merealisasikan potensi ekonomi yang ada di daerah yang menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan di kabupaten minahasa.

Tabel 1.3
Dana Alokasi Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2012-2016



Dari table 1.3 Menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kabupaten Minahasa mengalami naik turun, pada tahun 2002 – 2003 DAU Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan sebesar 14,7%. dan pada tahun 2004 – 2005 DAU Kabupaten Minahasa menurun, namun pada tahun 2006 DAU Kabupaten Minahasa kembali naik sebesar 99,7%, dan terus menerus naik sampai pada tahun 2016. Dari tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) kabupaten minahasa mengalami peningkatan pada tahun 2002-2009 dan turun sebesar 45% pada tahun 2010 dan naik sebesar 21% pada tahun 2011 dan kembali turun sebesar 8% pada tahun 2012 dan kembali naik pada 2013 sebesar 33% dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2015 sebesar 70.941 dan pada tahun 2016 sebesar 286.696.

Grafik 1.4
Dana Alokasi Khusus Kabupaten Minahasa Tahun 2012-2016



Dari grafik 1.4 di atas menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) kabupaten minahasa mengalami peningkatan pada tahun 2002-2009 dan turun sebesar 45% pada tahun 2010 dan naik sebesar 21% pada tahun 2011 dan kembali turun sebesar 8% pada tahun 2012 dan kembali naik pada 2013 sebesar 33% dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2015 sebesar 70.941 dan pada tahun 2016 sebesar 286.696.

Grafik 1.5
Dana Bagi Hasil Kabupaten Minahasa Tahun 2012-2016



Dari grafik 1.5 di atas menunjukkan Dana bagi hasil(DBH) tahun 2002 sampai 2011 terjadi fluktuatif dan dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami penurunan yang signifikan, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan.

Maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Variabel-Variabel yang mempengaruhi belanja daerah kabupaten minahasa.”

Tinjauan Pustaka

Belanja Daerah

Menurut UU 33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan dua kelompok belanja, yaitu yang pertama belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan dan kegiatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. Meskipun daerah juga mendapatkan sumber-sumber dari PAD, namun PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah (Hariyanto, 2005).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan pendapatan lain lain yang sah.

Dana Alokasi Umum (Dau)

Pengertian Dana Alokasi Umum adalah Menurut Brojonegoro dan C. Risyana dalam Sidik, dkk (2002:155), “Dana Alokasi Umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah”. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perhitungannya DAU menggunakan formula yang menggunakan beberapa aspek seperti luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak tingkat kemiskinan.

Dana Alokasi Khusus (Dak)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal

Dana Bagi Hasil (Dbh)

DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPH perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series*, yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Minahasa.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka.

Metode Analisis Data**Analisis Regresi Berganda**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel depende, dengan asumsi variabel yang lain konstan dimana rumusnya : $Y = f(x_1, x_2, x_3, x_4)$

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Ujistatistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji Normalitas

Uji Normalitas data yaitu melakukan pengujian terhadap data yang dimiliki untuk menguji normal tidaknya sebaran data yang akan dinalisis, dengan uji normalitas residual yaitu dengan menggunakan grafik dan Kolmogorov Smirnov.

.Uji Asumsi Klasik

Multikolinearitas diartikan sebagai adanya hubungan linear baik yang pasti maupun yang mendekati pasti diantara variabel X, konsekuensi dan multikolinearitas yaitu bila ada kolinearitas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak tentu ada kesalahan standarnya tak terhigga.

Uji Autokorelasi

Satu asumsi penting dalam model regresi linier klasik ialah bahwa tidak ada autokoreasi, yaitu korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu (*data time series*) dan data silang waktu (*data crossection*). Untuk mendeteksi hal tersebut maka digunakan Uji statistic Durbin Waston (Ghozali, 2005: 96)

Uji Heterokedastisitas

Tujuan Uji Heterokedastisitas adalah menguji sebuah model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *varians* dan *residual* dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *varians* dan *residual* dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas*. Dan jika *varians* berbeda, disebut *heteroskedastisitas*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.1 Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	75400.902	78305.270		.963	.358		
	PAD	6.511	2.391	.485	2.723	.021	.126	7.907
	DAU	.653	.289	.353	2.258	.048	.164	6.111
	DAK	.844	.418	.202	2.020	.071	.402	2.487
	DBH	2.966	3.596	.062	.825	.429	.701	1.426

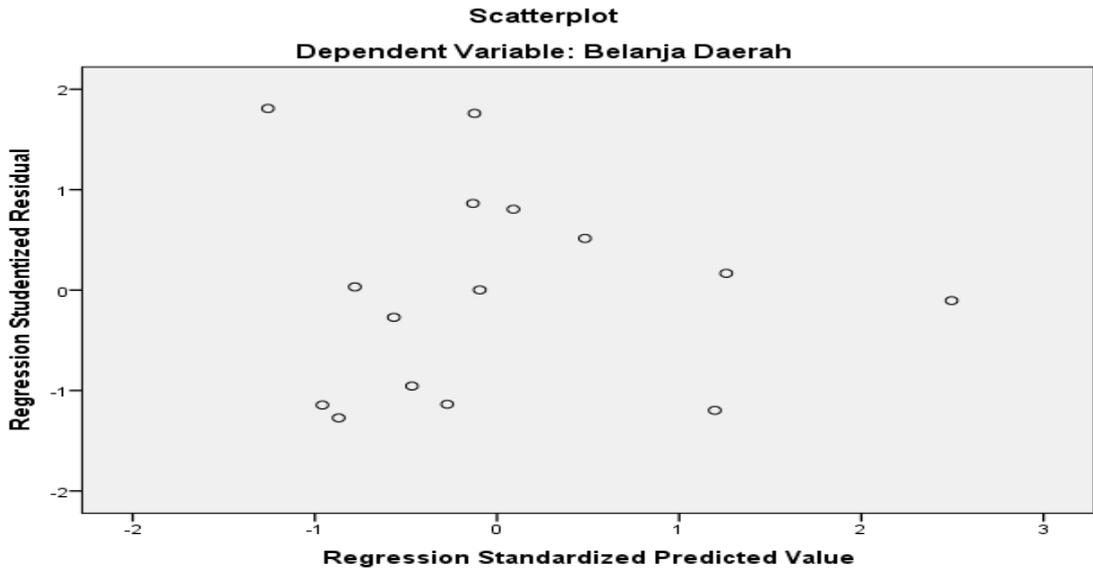
a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa : nilai tolerance variabel PAD (X₁), DAU (X₂), DAK (X₃), DBH (X₄). yakni lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF variabel PAD (X₁), DAU X₂), DAK (X₃), DBH (X₄). Yakni lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplot di atas, jika data menyebar pada garis nol dan tanpa membentuk pola tertentu maka data dapat dikatakan bebas Heteroskedastisitas, atau data homogen.

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas



Uji Autokolerasi

Tabel 4.3 Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.980 ^a	.960	.944	65924.30780	1.397

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAK, DAU
 b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 15, serta variabel independen (k) = 4 diperoleh nilai DL sebesar 0.4441 dan DU sebesar 2.2833, karena nilai DW 1.397 berada pada antar DL & DU . maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (berada di keragu-raguan)

Hasil Analisis Regresi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980 ^a	.960	.944	65924.30780

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAK, DAU
 b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Nilai Koefisien Determinasi (R²) 0,960 = 96,0%. Dengan demikian bahwa pengaruh pendapatan pemerintah pada bidang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil. secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa adalah sebesar 96,0%. Sedangkan sisanya 4.0% ditentukan oleh variabel-variabel lain.

Uji t-statistik

Nilai t_{hitung} Pendapatan Asli Daerah adalah 2.723, Nilai t_{hitung} Dana Alokasi Umum adalah 2.258, dan Nilai t_{hitung} Dana Alokasi Khusus adalah 2.020, Dana Bagi Hasil adalah 0.825, Nilai t_{tabel} adalah 2.228 yang diperoleh dengan Alpha 0.10 dan df sebesar yakni (15-4-1).

Berdasarkan dari output diatas menunjukkan bahwa variabel PAD X_1 , DAU X_2 dan DAK X_3 berpengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y Belanja daerah, Maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Dilihat dari output diatas menunjukkan bahwa DBH X_4 positif tapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y Belanja Daerah. Maka H_0 diterima dan H_A ditolak.

Uji F-Statistik

Tabel 4.6 Uji F (Uji simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1042101502399.170	4	260525375599.792	59.946	.000 ^b
	Residual	43460143591.230	10	4346014359.123		
	Total	1085561645990.400	14			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAK, DAU

Berdasarkan output diatas tampak bahwa nilai F_{hitung} pada model penelitian ini adalah sebesar 59.946 dengan taraf signifikansi sebesar 0.000 nilai F tabel adalah 3,357 adalah yang diperoleh dengan Alpa 005 dan df (15=jumlah sampel – 4=variabel bebas . Nilai F_{hitung} 59.946 lebih besar dari F_{tabel} 3,357 maka H_A diterima dan H_0 ditolak ,maka dengan demikian variabel independen berpengaruh secara bersama –sama (simultan) terhadap variabel dependen.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Variabel Belanja Daerah, Dengan kata lain semakin tinggi PAD semakin tinggi juga Belanja Daerah.
2. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Variabel Belanja Daerah, dengan kata lain semakin tinggi DAU,semakin besar pula alokasi Belanja daerah.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Variabel Belanja Daerah, dengan kata lain semakin tinggi DAK,semakin besar pula alokasi Belanja Daerah.
4. Variabel Dana Bagi Hasil positif tapi tidak berpengaruh terhadap Variabel Belanja Daerah
5. Jadi Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Berpengaruh secara simultan atau secara Bersama-sama terhadap Belanja Daerah.

Saran

1. Untuk meningkatkan Alokasi Belanja Daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel dan menambah periode penelitian agar hasil penelitian bisa lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, O. (2014).** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008.
- Adi dan Ekaristi, (2009:5)** pengertian dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil.
- Brojonegoro dan C. Risyana dalam Sidik, dkk (2002:155)** pengertian Dana Alokasi Umum
- Irdha Anisyah Marsudi Gorahe, Vecky Masinambow dan Daisy Engka (2014)** “*Analisis Belanja Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di provinsi Sulawesi utara*”
- Kuncoro (2007)** meneliti tentang “Fenomena *Flypaper effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia”.
- Maimunah, M. (2006).** *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.
- Masdjajo, G.N. dan Sukartono. (2009).** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Permatasari, I. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasi terhadap Belanja Modal.
- Nordiawan et al., (2007)** APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
- Nur handayani (2016)** “pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah pada kabupaten /kota jawa timur”
- Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.** Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049.
- Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.** Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 126.
- Rido aghi (2011)** “analisis belanja daerah dan faktor faktor yang mempengaruhinya di kabupaten dan kota provinsi jawa tengah periode 2004-2009”
- Setiawan, (2010:16)** Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional
- Sasana (2011)** “Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal”
- Tri Hartitik (2014)** dengan judul Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Widiyanto Tahun 2004** tentang “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/kota Di Propinsi DIY dan Jawa Tengah”.